

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan menurut Tedi Priatna merupakan “usaha pengembangan kualitas diri manusia dalam segala aspeknya, pendidikan sebagai aktivitas yang disengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi” (Hikmat, 2011: 16). Pendidikan dari mulai usia dini terus berlangsung tidak ada hentinya untuk terus mengembangkan kualitas diri manusia dengan berbagai proses.

Pendidikan Islam adalah pendidikan yang berdasarkan Alquran, hadits dan akal. Perkembangan dan kemajuan zaman harus mendorong juga pada kemajuan pendidikan Islami. Pengelolaan Pendidikan Islam menjadi salah satu cara agar pendidikan Islam terus maju dan berkembang (Tafsir, 2013: 18). Kemajuan dan perkembangan zaman tidak ada hentinya menuntut suatu perubahan dan peningkatan kualitas dari aspek apapun, sehingga pendidikan Islam pun diharapkan harus terus maju dan berkembang untuk menyeimbangi setiap kemajuan dan perkembangan zaman.

Menurut G.R. Terry, manajemen adalah “suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran, yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya” (Badrudin, 2013: 3).

Manajemen pendidikan Islam terdiri dari berbagai komponen, baik dari manajemen pendidik dan kependidikan, manajemen peserta didik, manajemen sarana prasarana, manajemen hubungan masyarakat sekolah, dan lain sebagainya. Tujuan pendidikan pada hakikatnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga yang menjadi objek utamanya adalah peserta didik.

Terciptanya mutu sekolah adalah kepuasan siswa sehingga usaha peningkatan mutu sekolah fokus pada pelayanan, kedisiplinan, kemandirian, kecepatan dalam pengambilan keputusan, pengendalian strategik, dan teknologi unggul. Budaya mutu akan menjadi kesadaran bersama dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif, efisien dan berkualitas (Rahman, 2012: 245).

Kebijakan negara mencerminkan perhatian baru terhadap dimensi nilai-nilai dalam kurikulum sekolah. Ketika berkembang kesadaran bahwa kelangsungan hidup kita di abad yang akan datang bergantung pada kemampuan kita untuk hidup selaras dengan alam, pendidik menemukan cara yang membantu peserta didik mengembangkan penghargaan dan tanggungjawab terhadap lingkungan (Lickona, 2013: 244). Menjadi masyarakat terdidik adalah yang seharusnya berpengaruh pada lingkungannya dan tugas terbesarnya adalah membantu mengajak masyarakat pada perubahan yang lebih baik.

Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 ada delapan yang menjadi sorotan dalam melaksanakan Standar Nasional Pendidikan, yaitu “standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,

standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian” (Rusdiana, 2015:56).

Standar Nasional tersebut minimalnya terpenuhi oleh setiap satuan pendidikan karena pada hakikatnya tujuan dari kedelapan standar tersebut adalah untuk pemerataan pendidikan di Indonesia. Otonomi daerah menjadikan setiap satuan pendidikan memiliki berbagai cara untuk mencerdaskan setiap peserta didiknya agar menjadi lulusan-lulusan yang berkualitas dan berdaya saing.

Pada satuan pendidikan peserta didik diharapkan memiliki tingkat prestasi yang baik sehingga setiap sekolah memiliki cara tersendiri untuk mencapai harapan itu. Adanya otonomi daerah yang menjadikan satuan pendidikan memiliki hak untuk membuat keputusan di lingkungan sekolah yaitu memudahkan setiap sekolah untuk menggunakan pengelolaan sekolah yang lebih efektif dikarenakan lebih mengetahui kondisi dan situasi yang ada. Faktor-faktor pendukung meningkatnya prestasi belajar dari berbagai hal, baik dari kurikulumnya, penyampaian pendidiknya, sarana-prasarana yang memadai, kebijakan di satuan pendidikan, pengaruh orang tua dan lingkungan. Hal itu lah memberikan gambaran bahwa kompetensi lulusan sangat penting di setiap satuan pendidikan.

Standar kompetensi lulusan berdasarkan peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 adalah “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan” (Rusdiana, 2015: 57).

Dari hasil studi pendahuluan peneliti telah melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 6 November 2017 dengan Elly Herlina, M.MPd sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, diperoleh keterangan bahwa SDIT Luqmanul Hakim selain mengikuti Standar Kompetensi Lulusan dari Permendikbud, SDIT Luqmanul Hakim memiliki salah satu standar lulusan yaitu hafal 2 juz Alquran. Tenaga pendidik di SDIT Luqmanul Hakim terdiri dari guru mata pelajaran dan terdapat guru Tilawah *Tahfidz* Quran (TTQ). Kegiatan *Tahfidz* dipegang oleh satu orang koordinator dan dibantu oleh 17 guru tilawah dan 38 guru *tahfid*. Setiap kelompok perbandingannya satu guru dengan 12 sampai 15 peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap harinya terdapat 2 jam pelajaran kegiatan tilawah *tahfidz* yang dijadwalkan sekolah. Kegiatan ini yang membantu agar tercapainya lulusan-lulusan SDIT Luqmanul Hakim hafal Quran minimalnya 2 juz yaitu juz 30 dan 29. Namun pada hasilnya ditemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai SKL yaitu hafal 2 juz Alquran, masih ada beberapa kelas 6 yang akan lulus yang belum hafal juz 29.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diidentifikasi masalah yaitu bagaimana manajemen program tilawah tahfidz Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung? Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat program tilawah tahfidz Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung? Bagaimana hasil program tilawah tahfidz Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung? Dari permasalahan tersebut, maka peneliti menarik satu masalah dengan mengangkat judul: **Manajemen Peningkatan Kompetensi**

Lulusan (Studi Penelitian tentang Program Tilawah *Tahfidz* Alquran Di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar alamiah SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung?
2. Bagaimana perencanaan program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung?
3. Bagaimana pengorganisasian program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung?
4. Bagaimana pelaksanaan program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung?
5. Bagaimana pengawasan program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung?
6. Apa yang menjadi faktor penunjang dan penghambat program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung?
7. Bagaimana hasil program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui latar alamiah SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung.
2. Mengetahui perencanaan program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung.

3. Mengetahui pengorganisasian program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung.
4. Mengetahui pelaksanaan program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung.
5. Mengetahui pengawasan program tilawah *tahfidz* Alquran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung.
6. Mengetahui faktor penunjang dan penghambat program tilawah *tahfidz* quran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung.
7. Mengetahui hasil program tilawah *tahfidz* quran di SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah hazanah keilmuan dalam dunia pendidikan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan informasi terutama yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi lulusan.
- b. Diharapkan dapat dijadikan referensi pengembangan manajemen peningkatan kompetensi lulusan pada satuan lembaga pendidikan.
- c. Diharapkan dapat memberikan gambaran untuk pertimbangan standar kompetensi lulusan di satuan lembaga pendidikan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri-ciri yang membedakan dengan penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (*entity*). Menurut Licon dan Guba “hal ini dilakukan karena ontologi alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika pisakan dari konteksnya” (Lexy Moleong, 2012, 8)

Manajemen adalah suatu proses yang khas terdiri atas tindakan-tindakan berupa perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Jaja Jahari, 2013: 1).

Menurut G.R. Terry, manajemen adalah “suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran, yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya” (Badrudin, 2013: 3).

Fungsi manajemen menurut G.R. Terry diantaranya *planing* yaitu pembatasan yang kompleks merumuskan perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bila hal itu dicapai, siapa yang bertanggungjawab, dan mengapa penetapan harus dicapai. Dalam perencanaan disusun dan ditetapkan *budgeting*. Oleh karena itu lebih tepat *planning* dirumuskan sebagai penetapan

tujuan, *policy*, prosedur, *budget*, dan program dari suatu organisasi (Badrudin, 2013: 15).

Organizing merupakan pengelompokan kegiatan yang diperlukan, yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang adadalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian dapat rumuskan sebagai keseluruhan aktifitas manajemen dalam mengelompokan orang-orang, serta penetapan tugas, fungsi, wewenang dan masing-masing tanggung jawab dengan tujuan terciptanya aktifitas-aktifitas yang berdaya guna, dan berhasil guna, dalam mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya (Badrudin, 2013: 16).

Actuating merupakan tindakan pelaksanaan dari rencana yang dibuat. Pelaksanaan dilakukan jika fungsi perencanaan sudah matang dibuat. Pelaksanaan dalam manajemen lebih dikenal dengan bahasa implementasi program. (Badrudin, 2013: 16). Selanjutnya *Controlling* atau pengawasan sering disebut juga pengendalian yaitu mengadakan pemantauan dan koreksi sehingga bawahan dapat melakukan tugasnya dengan benar sesuai tujuan semula (Badrudin, 2013: 17).

Peningkatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata turunan dari kata tingkat yang berarti 1) susunan berlapis-lapis atau berlinggek-linggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang), 2) tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, pedadaban, dan sebagainya); pangkat; derajat; taraf; kelas, 3) batas waktu (masa); sempadan suatu peristiwa (proses, kejadian, dan sebagainya; babak(an); tahap. Sedangkan peningkatan berarti proses, cara, perbuatan, meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya) (Wiyanto dkk, 2016).

Mutu menjadi salah satu kata yang populer di dunia pendidikan kita ahir-akhir ini. Setidaknya ada tingkat verbal, sudah muncul kesadaran untuk membangun pendidikan yang bermutu atau melakukan kegiatan pembelajaran

yang bermutu. Bahkan, ada kalanya kata mutu juga dipergunakan sebagai acuan untuk mengoreksi perilaku dan tindakan yang asal-asalan. Mutu dan bermutu menjadi dambaan bukan saja orang tua siswa, tetapi juga para pendidik dan tenaga kependidikan di lembaga pendidikan, serta para pengguna lulusan lembaga pendidikan (Sanusi, 201: 35).

Jaminan mutu didesain untuk menjamin bahwa proses produksi menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jaminan mutu adalah cara memproduksi produk bebas dari cacat dan kesalahan. Jaminan mutu adalah pemenuhan spesifikasi produk secara konsisten atau menghasilkan produk yang selalu baik sejak awal (*right first time every time*). Penekanan ini bertujuan untuk mencegah terjadi kesalahan sejak awal proses produksi (Sallis, 2011: 59).

Siswa-siswa yang kurang *talented* sering kali kurang memiliki keterampilan untuk bekerja secara mandiri. Hal ini mengharuskan pendidik untuk menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat mengembangkan keterampilan ini. Pendidik juga harus berusaha mengadaptasikan pelajarannya dengan berbagai macam cara. Mengobservasi siswa dengan kebutuhan khusus yang berhasil mengembangkan keterampilan menyelidiki dan mengatasi masalah dan menjadi pelajar yang mandiri mungkin merupakan salah satu pengalaman paling berharga bagi pendidik (Arends, 2008: 61).

Proses penjaminan mutu dimulai dengan penetapan standar, prosedur dan *input* suatu sistem, sementara produk dari proses penjaminan mutu tersebut adalah konsistensi antara standar, prosedur dalam proses dengan standar, prosedur dalam

input yang telah ditetapkan sebelumnya. Derajat konsistensi antara berbagai standar mutu yang dijanjikan dalam *input* dengan pelaksanaan dalam proses, merupakan umpan balik dalam menindaklanjuti terutama untuk memeriksa dan meningkatkan kualitas pendidikan yang sedang dilaksanakan (Meirawan, 2010: 128).

Standarisasi adalah usaha menetapkan standar yang digunakan untuk mengukur prestasi. Hal ini biasanya dilakukan dengan cara mencari institusi terbaik dari sebuah kompetisi serta memahami cara mereka dalam menghasilkan mutu. Standarisasi merupakan sebuah cara menetapkan sebuah keuntungan kompetitif, berkaitan dengan mencari tahu siapa saja yang terbaik dan upaya apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan mereka. Hal tersebut bisa mempercepat pengembangan kurikulum baru dan bisa menjamin bahwa standar-standar mutu tersebut digunakan dalam setiap tahap perencanaan (Sallis, 2011: 208).

Standar Nasional Pendidikan (SNP) menurut Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah “Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dengan kata lain setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria minimum yang telah ditentukan. Hal tersebut dilaksanakan agar tercapainya tujuan pemerataan pendidikan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rusdiana, 2015: 55).

Standar kompetensi lulusan berdasarkan PP No 19 tahun 2005 standar kompetensi lulusan adalah “kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai

pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan” (Rusdiana, 2015: 57).

Tujuan pendidikan dibagi menjadi tiga ranah: kognitif, afektif, dan psikomotor. Perilaku-perilaku dari ketiga ranah ini tentunya terjadi secara simultan. Ketika siswa sedang menulis (psikomotor), mereka juga mengingat atau menalar (kognitif), dan mereka kemungkinan besar juga memiliki respon emosional tertentu terhadap tugas itu (afektif) (Woolfolk, 2009: 351).

Tanggungjawab peningkatan mutu pendidikan secara mikro telah bergeser dari birokrasi pusat ke unit pengelola yang lebih dasar yaitu sekolah. Kondisi ini telah membawa kepada suatu kesadaran bahwa hanya sekolah yang dikelola secara efektiflah yang akan mampu merespon aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat dalam hal mutu pendidikan. Birokrasi pusat bukan lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi hanya berperan sebagai penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui sistem monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri kepada tanggungjawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus menerus menyempurkan satuan pendidikannya (Rivai dan Sylviana Murni, 2010: 170).

Pendekatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu pertama, perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*). Konsep ini mengandung pengertian bahwa pihak pengelola senantiasa melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan secara terus menerus untuk menjamin semua komponen penyelenggara pendidikan telah mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Konsep ini senantiasa memperbaharui proses pendidikan berdasarkan kebutuhan dan tuntutan pelanggan. Jika tuntutan dan kebutuhan pelanggan berubah, maka pihak pengelola institusi pendidikan dengan sendirinya akan merubah mutu, serta selalu memperbaharui komponen produksi atau komponen-komponen yang ada dalam institusi pendidikan (Suti, 2011: 2).

Menentukan kriteria lulusan di sebuah sekolah, perlu adanya standarisasi yang merupakan suatu pengejawantahan dari paham *all can be measured* bahwa segala sesuatu yang dapat diukur. Karena segala sesuatu dapat diukur, maka akan tercapai efisiensi dan diketahui kualitas lulusan yang dihasilkan. Dalam konteks pendidikan nasional diperlukan standar yang perlu dicapai dalam waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Beare sebagaimana yang dikutip oleh Fatimah memberikan petunjuk bahwa standar mutu lulusan dapat ditetapkan dengan (Muzakar,2014: 123):

1. Membandingkan dengan mutu yang telah lalu (*comparation with the past*)
2. Menggunakan mutu dari organisasi lain (*quality of other system*)
3. Menetapkan mutu yang diinginkan (*desired quality*)
4. Mutu menurut pertimbangan profesional (*professional standars of quality*)
5. Mutu untuk bertahan hidup (*survival qualiti*)
6. Mutu yang direncanakan (*planned quality*)
7. Mutu optimal (*optimal quality*)

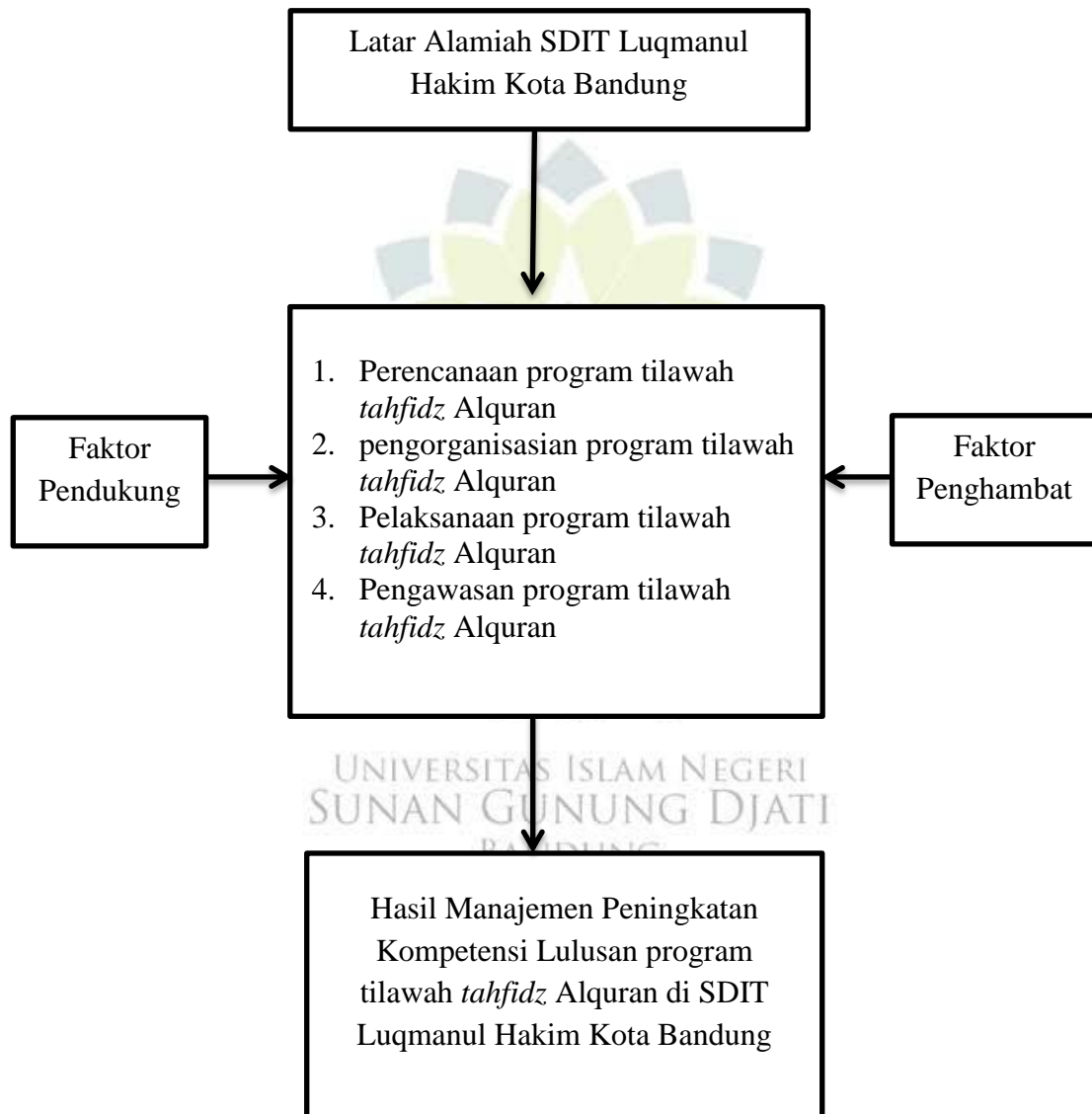
Faktor penunjang adalah segala sesuatu yang mendukung terhadap pelaksanaan pendidikan dalam mencapai tujuan. Sedangkan faktor penghambat adalah segala sesuatu yang mempengaruhi dan menghambat terhadap pelaksanaan pendidikan dan dalam mencapai tujuan. Faktor penunjang dan penghambat yang ditemukan dapat meningkatkan manajemen peningkatan kompetensi lulusan di Sekolah Dasar Islam Terpadu dengan lebih optimal. Kajian mengenai faktor-faktor tersebut akan memengaruhi pada tingkat keberhasilan sebuah standar lulusan.

Keberhasilan dalam pelaksanaan peningkatan kompetensi lulusan tersebut terlihat sesuai tidaknya tujuan ada dalam konsep dan realita pelaksanaannya. Untuk dapat mengetahui manajemen peningkatan kompetensi lulusan SDIT Luqmanul Hakim Kota Bandung, maka dilaksanakan penelitian. Kerangka skema tersebut dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Bagan 1.1**SKEMA MANAJEMEN PENINGKATAN KOMPETENSI LULUSAN**

(Studi Penelitian Program Tilawah *Tahfidz* Alquran Di Sekolah Dasar

Luqmanul Hakim Kota Bandung)



F. Kajian Pustaka yang Relevan

1. Buku Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah, Jogjakarta:IRCiSoD tahun 2011. Buku ini membahas mengenai mutu terpadu dalam pendidikan mulai dari analisis mutu secara umum sampai pada kaitan TQM dalam dunia pendidikan. Teori yang terdapat dalam buku ini adalah teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Teori yang relevan yaitu pengertian mutu pendidikan, komponen mutu pendidikan, prinsip mutu dan implementasi mutu pendidikan.
2. Tesis program studi magister manajemen pendidikan islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 dengan judul “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan” oleh Vera Mei Ringgawati. Tesis ini menjelaskan mengenai strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan di SMA negeri 1 Blitar dan SMA Negeri 1 Sutojayan. Pembahasannya meliputi perencanaan, implementasi dan evaluasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan serta perbandingan antara SMA Negeri 1 Blitar dan SMA Negeri 1 Sutojayan. Sedangkan peneliti tidak membahas perbandingan antara dua sekolah tapi fokus pada satu sekolah yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Luqmanul Hakim Kota Bandung. Teori yang diambil oleh peneliti adalah terkait mutu lulusan dan teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.
3. Jurnal yang ditulis oleh Muzakar dengan judul “Kinerja Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Meureubo” Vol 14. No 1 Agustus 2014. Jurnal ini membahas mengenai

kinerja kepala sekolah dan peran kepala sekolah terhadap sekolah, termasuk motivasi dan komitmen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan. Sedangkan peneliti tidak hanya fokus pada kinerja kepala sekolah tapi meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kompetensi lulusan.

